

**TINJAUAN *FIQIH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP
PENGIBARAN BENDERA JOLLY ROGER MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009
(Studi Terhadap Surat Edaran Bupati Tanggamus Provinsi Lampung)**

SKRIPSI

Oleh

Rizke Agustina

NIM. 05010422016



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizke Agustina
NIM : 05010422016
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pengibaran
Bendera Jolly Roger Menurut UU No.24 Tahun
2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang
Negara, Serta Lagu Kebangsaan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Sidoarjo, 26 November 2025
Saya yang menyatakan,



Rizke Agustina
NIM. 05010422016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rizke Agustina

NIM : 05010422016

Judul : Tinjauan *Fiqih Siyāsah* Terhadap Pengibaran Bendera Jolly Roger Menurut UU No.24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 26 November 2025

Pembimbing,



Elva Imeldatur Rohmah, M.H

NIP. 199204022020122018

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rizke Agustina
NIM. : 05010422016
Judul : Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Pengibaran Bendera Jolly Roger Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 (Studi Terhadap Surat Edaran Bupati Tanggamus Provinsi Lampung)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I, M.H
NIP. 199204022020122018

Penguji II

Prof. Hj. Dr. Nur Lailatul Musvafa'ah, Lc., M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji III

Dr. Mohamad Isfironi, M.H.I
NIP. 197008112005011002

Penguji IV

Nurika Falah Ilmania, M.H.
NIP. 200005032025052009

Surabaya, 17 Desember 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



H. H. Suqiyah Musvafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizke Agustina
NIM : 05010422016
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara Islam
E-mail address : radjaratuhaii11@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Fiqih siyāsah dustūriyah Terhadap Pengibaran Bendera Jolly Roger Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 (Studi Terhadap Surat Edaran Bupati Tanggamus Provinsi Lampung)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis


(Rizke Agustina)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemunculan peristiwa pengibaran bendera Jolly Roger yang terjadi menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, yang menimbulkan problematika hukum dan sosial terkait dengan perlindungan lambang kenegaraan serta jaminan hak kebebasan berekspresi bagi warga negara. Rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana hukum pengibaran bendera Jolly Roger berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta lagu kebangsaan dan bagaimana tinjauan *fiqih siyāsah dustūriyah* terhadap surat edaran Bupati Tanggamus.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*), yang mengkaji pengibaran Bendera Jolly Roger menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan kajian literatur *Fiqih siyāsah dustūriyah* terhadap Surat Edaran Bupati Tanggamus. Teknik pengumpulan bahan hukum meliputi studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkait pengibaran bendera. Teknik analisis data yang digunakan adalah model deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menegaskan Bendera Merah Putih sebagai lambang kedaulatan dan kehormatan bangsa yang utama, sedangkan pengibaran bendera lain termasuk Bendera Jolly Roger dapat dipahami sebagai ekspresi kebebasan berekspresi yang sah sepanjang tidak merendahkan kehormatan bendera negara dan tidak membahayakan ketertiban umum. Surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Tanggamus, menurut perspektif *fiqih siyāsah dustūriyah*, bertentangan dengan prinsip keadilan (*'adl*), musyawarah (*syura*), dan *maslahah* karena bersifat represif sepihak tanpa dalil kuat.

Sebagai saran, peneliti menyarankan agar pemerintah sebaiknya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang makna simbol-simbol non formal seperti Bendera Jolly Roger, dengan melibatkan ahli budaya dan komunitas penggemar anime, untuk mencegah kesalahpahaman dan mengarahkan ekspresi tersebut ke arah positif. Bupati Tanggamus hendaknya mengutamakan dialog dan edukasi untuk memelihara kerukunan sosial dan mengakomodasi aspirasi rakyat secara proporsional, tanpa tindakan represif yang berlebihan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Landasan Teori.....	13
H. Definisi Operasional.....	16
I. Metode Penelitian	18
BAB II KONSEP PENGIBARAN BENDERA DI INDONESIA, TEORI KEBEBASAN BEREKSPRESI, DAN <i>FIQIH SIYĀSAH DUSTURIYAH</i>	24
A. Konsep Pengibaran Bendera Di Indonesia	24
1. Pengertian Pengibaran Bendera	24
2. Dasar Hukum	25
3. Tata Cara dan Etika Pengibaran Bendera.....	27
4. Fungsi dan Tujuan Pengibaran Bendera.....	28
B. Teori Kebebasan Berekspresi	30
1. Pengertian Kebebasan Berekspresi	30
2. Ruang Lingkup Kebebasan Berekspresi	31

C. <i>Fiqih Siyāsah Dusturiyah</i>.....	33
1. Pengertian <i>Fiqih Siyāsah</i>	33
2. Ruang Lingkup <i>Fiqih siyāsah</i>	36
3. Pengertian <i>Fiqih siyāsah dustūriyah</i>	38
4. Ruang Lingkup <i>Fiqih siyāsah dustūriyah</i>	40
5. Prinsip-Prinsip <i>Fiqih siyāsah dustūriyah</i>	44
BAB III PENGIBARAN BENDERA JOLLY ROGER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN	47
A. Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.....	47
B. Analisis Pengibaran Bendera Jolly Roger Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.....	52
C. Implikasi Hukum dan Aspek Legalitas Pengibaran Bendera Jolly Roger.....	58
BAB IV TINJAUAN <i>FIQIH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i> TERHADAP SURAT EDARAN BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG TERKAIT LARANGAN PENGIBARAN BENDERA JOLLY ROGER.....	63
A. Fenomena Pengibaran Bendera Jolly Roger Di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.....	63
B. Larangan Pengibaran Bendera Jolly Roger Di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.....	64
C. Tinjauan <i>Fiqih Siyāsah Dusturiyah</i> Terhadap Larangan Pengibaran Bendera Jolly Roger.....	68
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	88
BIOGRAFI PENULIS	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Pengibaran Bendera Jolly Roger pada saat demo	54
Gambar 3.2 Pengibaran Bendera Jolly Roger di teras rumah	55
Gambar 3.3 Pengibaran Bendera Jolly Roger di kendaraan	57
Gambar 4.1 Surat Edaran Bupati Tanggamus, Provinsi Lampung.....	65



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

i. Buku

Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. *Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI, 2022.

Syafuri. *Fiqih Siyasah Di Era Globalisasi*. Sumedang, Penerbityad.com, 2025.

Rifa'i Abu bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Februari 2021.

Muh Khamdan. *Keprotokolan*. Semarang: Balai Pendidikan Dan Pelatihan (Badiklat), 2023.

Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, 2019.

ii. Jurnal Dan Skripsi

Aqil, Hasan Labiqul, dan Danang Puji Atmojo. "Politik Simbolik dan Resistensi Kultural Anak Muda Menjelang HUT ke-80 RI: Analisis Wacana Pengibaran Bendera *One piece*." *Jurnal Nawala Politika* 3, no. 2 (2025): 79-98.

Assadiyah, Diani. "Respons Publik terhadap Isu Bendera *One piece* di TikTok Menjelang HUT RI," *Jurnal Nawala Politika* 3, no. 2 (2025): 61-78.

Begouvic, M. Eza Helyatha. "Pembuatan Undang-Undang dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Lex Superior* 1, no. 1 (2022): 58-75.

Belaga, Nurul Alfiah, Hernimus Ratu Udju, dan Jenny Ermalinda. "Tugas dan Fungsi Lurah dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Weru, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur." *Petitum Law Journal* 3, no. 1 (2025): 84-102.

Diamantina, Amalia, Fifiana Wisnaeni, Retno Saraswati, Ratna Herawati, dan Sekar Anggun. "Kajian Yuridis Materi Muatan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 terhadap Nilai-Nilai Pancasila." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, (2021): 98-110.

Diana, Kristina, dan Nur Chotimah. "Pengaruh Upacara Bendera dalam Meningkatkan Semangat Nasionalisme pada Peserta Didik di SMAS ST. Petrus Kewapante." *PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 3 (2024): 168-174.

Diana, Rashda, Abdul Rohman, dan Harisman H. "Konsep Kepemimpinan Islam: Telaah Pemikiran Politik Islam al-Mawardi." *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 19, no. 2 (2021): 191-207.

Fajar Kamizi, Sarkowi, dan Dodi Irawan Marzuki. "Konsep Kekuasaan dalam Siyasah Dusturiyah dan Relevansinya terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia." *Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2025): 17-24.

Febri Souisa. "Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Kejahatan Makar." *Journal Syntax Idea* 6, no. 6 (2024): 3468-3472.

Firmaningrum, Yuanggi, Dimas Ahmad Sarbani, M. Nur Alfian Khoiri, dan Rijal Amiruddin. "Konsep Kenegaraan 'Imam Mawardi.'" *Al-Fatih: Jurnal Studi Islam* 8, no. 02 (2020): 171-182.

Hanif, David. "Analisis Fiqih Siyasah tentang Khilafah Dalam Al-Ahkam As-Shulthaniyyah." *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 153-166.

Harsya, Rabith Madah Khulaili. "Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Platform Digital atas Konten Ilegal menurut Hukum Indonesia." *Sanskara Hukum dan HAM*, "Sanskara Hukum dan HAM" 4, no. 01 (2025): 276-286.

Husni, Fadhilatul, "Kebebasan Berekspresi dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Ijtihad* 36, no. 1 (2021): 75-86.

- Jingga Pramesti Pujianingsih, Raditya Bagus Jati Wibowo, dan Endrise Septina Rawanoko Rizqan Rusnamba. "Peranan Upacara Bendera dalam Menanamkan Sikap Nasionalisme pada Siswa Sekolah Dasar." *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan* 3, no. 1 (2025): 23-36.
- Julianja, Sufiana. "Pembatasan Kebebasan Berkespresi dalam Bermedia Sosial : Evaluasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Padjadjaran Law Review* 6, no. 1 (2020): 17-29.
- Junaedi, Asep Mahbub, dan Siti Ngainnur Rohmah. "Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasah." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020): 225-48.
- Kamizi, Fajar, Sarkowi Sarkowi, Marzuki Marzuki, dan Dodi Irawan. "Konsep Kekuasaan dalam Siyasah Dusturiyah dan Relevansinya terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia." *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2025): 17-24.
- Kusuma, Ersal. "Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Sanskara Hukum dan HAM* 1, no. 03 (2023): 97-101.
- Kusyani, Diah, Siti Fatimah Zahara, dan Sri Muliatik. "Implementasi UU No. 24 Tahun 2009 bagi Siswa-Siswi SMP Al Washliyah 8 Medan dengan Tema Bahasa Dunia Milenial." *Wahana Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 9-17.
- Lasonda, Denta, Caesarrani Ariningdyah, Salsabila Maulida Rahmah, Fajar Rachmad Dwi Miarsa, dan Achmad Fawwaz Asyraf. "Analisis Yuridis terkait Asas Kebebasan Berekspresi dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran terhadap Pembuat Konten." *Halu Oleo Law Review* 8, no. 2 (2024): 242-257.

- Mahbubi, M. "Pengaruh Budaya Populer terhadap Pembentukan Karakter Siswa dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam." *Journal of Islamic Studies and Research* 2, no. 1 (2025): 574-586.
- Manaf, Abdul. "Teori Kepemimpinan dalam Perspektif Fiqih Syi'ah dan Sunni." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 7, no. 1 (2023): 83-96.
- Masyrofah, dan Gilang Rizki Aji Putra. "Pandangan Imam Al-Mawardi tentang Wizarah dan Kedudukan Wazir." *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 6, no. 3 (2022): 44-53.
- Mutmainah, Ayu Intan, dan Asmanul Husna. "Simbol Budaya Populer, Lambang Negara dan Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan* 5, no. 1 (2025): 197-206.
- Ni Luh Eka Yulianggeni, I Made Agus Aryanata. "Teori dan Aplikasi Sikap Sebagai Anggota Pasukan Pengibar Bendera." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (2024): 24-35.
- Nugroho, Eko Rial. "Memaknai Kata Wajib dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan." *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 9 (2023): 2741-2748.
- Octavianingsih, Yetti, dan Rachmat Abdillah. "Hak Kebebasan Berekspresi Sebagai Hak Konstitusional: Analisis Normatif Berdasarkan Uud 1945 dan Teori Konstitusi." *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 6 (2025): 91-105.
- Olivia, Denindah. "Hakikat Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Rio Law Jurnal* 1, no. 2 (2020): 1-13 .

- Pramadhani, Laura, Sabina Casmaranandika, Ivanazarine Ulma Livi, dan Juni Aditya Hidayatullah. "Multitafsir Aparat dan Pemerintah terhadap Pengibaran Bendera *One piece*: Analisis Politik Simbolik dan Krisis Kebebasan Berekspresi di Indonesia." *Research Gate*, (2025): 1-11.
- Pratiwi, Sulaiman. "Fenomena Maraknya Pengibaran Bendera *One piece* Menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2025: Kajian Budaya Pop dan Nasionalisme." *Academic Letters* 1, no. 4 (2025): 77-80.
- Putri, Adinda Dwi, Fitria Nurkarimah, Anisa Rahmi, dan Wismanto Wismanto. "Fiqih Siyasah dalam Pembelajaran Islam." *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 223.
- Putri, Aldira, dan Rahmi Zubaedah. "Ekspresi Kritik Rakyat dalam Ruang Publik : Analisis Hukum dan Demokrasi pada Fenomena "Bendera *One piece*" dan "Negara Konoha." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 16, no. 1 (2025): 1470-1482.
- Rahmat, Abdul Latif, dan Kholid Mawardi. "Sistem Pemerintahan, Politik dan Peran Ahlu Hall Wal 'Aqdi pada Masa Khulafaur Rasyidin." *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management* 4, no. 1 (2023): 30-41.
- Rahmman, Riyan, Sahuri Lasmadi, dan Usman. "Tindak Pidana Makar dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana." *Hangoluan Law Review* 3, no. 2 (2024): 507-544.
- Ratumbanua, Jeanever Trivosa. "Sanksi Hukum Akibat Tidak Melaksanakan Kewajiban Dan Mematuhi Larangan Sebagai Organisasi Kemasyarakatan." *Lex Administratum* 9, no. 3 (2021): 68-77.
- Rembet, Michael Sharon. "Larangan Bagi Organisasi Kemasyarakatan dan Pemberlakuan Sanksi Administratif." *Lex Administratum* 8, no. 4 (2020): 223-231.

- Rizki, Deony, dan Yofiendi. "Analisis Framing, Pemberitaan Media Terhadap Pemasangan Bendera *One piece* di Hari Kemerdekaan Indonesia." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 5, no. 4 (2025): 4823-4834.
- Rosid, Ibnu. "Dinamika Pengaturan Simbol Negara dan Kebebasan Ekspresi terhadap Polemik Mengenai Bendera *One piece*." *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 4, no. 1 (2025): 33-40.
- Rosyidi, Muhammad. "Penerapan Fiqih Siyasah dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 65-76.
- Sabella, Shalsa Putri, dan Rita Rahmawati. "Program Keluarga Harapan Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah." *Manabia: Journal of Constitutional Law* 3, no. 02 (2023): 171-182.
- Safriadi, Marzuki. "Analisis Komparatif tentang Kriteria Kepala Negara menurut Imam Al-Mawardi Dan Imam Al-Ghazali." *Jurnal Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 1, no. 2 (2023): 61-80.
- Santoso, Gunawan, Haevina Aulia Rizqy, Hilwa Hidayah Assaadih, dan Rizka Amalia Bintang. "Peran Bendera Merah Putih dan Bahasa Indonesia sebagai Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)* 01, no. 03 (2022): 183-194.
- Sayuti. "Konsep Wilayatul Hisbah Menurut Imam Al-Mawardi." *Jurnal Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 2, no. 1 (2024): 51-70.
- Siddiqy, Farhan Abdullah Amir, Beni Ahmad Saebani, dan Yana Sutiana. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah tentang Fungsi Partai Politik dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia." *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 5 (2025): 3190-3202.

- Suhaimi, Ahmad, dan Nurul Syalafiyah. "Implementasi Prinsip Al-Maslahah dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Nganjuk: Perspektif Fiqh Siyasah." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 2 (2025): 215-232.
- Sumilat, Veibe V, dan Harly S Muaja. "Pemberlakuan Ketentuan Pidana Apabila Melakukan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera Bahasa Dan Lambang Negara." *Lex Privatum* 9, no. 2 (2023): 1-10.
- Syahputra, Yusuf. "Fiqh siyasah; tinjauan tentang pemikiran politik hukum tata negara dalam perspektif islam." *Maliki Interdisciplinary Journal* 3, no. 5 (2025): 993-999.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–2478.
- Tri Bowo Hersandy Febrianto, Isti Puspitasari, Yohana Sekar Pawening, dan Irwan Triadi. "Bendera Merah Putih dalam Prespektif Bela Negara." *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 1, no. 4 (2023): 68-76.
- Umami, Saipul, Iksir Alkholy Rizman, dan Riki Andika Putra. "Penerapan Prinsip Fiqh Siyasah dalam Kepemimpinan Modern: Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer." *Equality: Law and Social* 1, no. 1 (2025): 27-33.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (2024): 57-65.
- Wulandari, Astri, dan Zainuddin Zainuddin. "Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah." *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2021): 81-87.

Wulandari, Reni, dan Udin Juhrocin. "Analisis Urf terhadap Pengibaran Bendera Kuning (Penelitian di Desa Cihanyir Kecamatan Cikancung Kab. Bandung)." *Journal Stai Al-Jawami* 2, no. 2 (2022): 1-11.

Yunus, Moch. "Pemikiran Politik Imam Al-Mawardi tentang Pengangkatan Imam (Khalifah)." *Jurnal Keislaman* 6, no. 2 (2020): 191-209.

Zainuddin, Muhammad, dan Aisyah Dinda Karina. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum." *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114-123.

Zulkhaidirkadir. "Pengibaran Bendera *One piece* dan Produksi Musuh Imajiner: Pendekatan Kriminologi Kritis atas Politik Ketakutan." *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2025): 41-54.

iii. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di muka Umum.

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

iv. Berita dan Website

Achmad Nasrudin Yahya, Fitria Chusna Farisa. "Alasan Sopir Truk Bekasi Kibarkan Bendera *One piece*: Ekonomi Lesu, Banyak Pengangguran." Kompas.com.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2025/08/06/16300261/alasan-sopir-truk-bekasi-kibarkan-bendera-one-piece-ekonomi-lesu-banyak>.

Array. “Larangan Bendera *One piece* di Tanggamus Jadi Olok-olok Publik: ‘Ngurusin Kartun, Jalan Rusak Dibiarkan.’” *Jurnal TV Online*, t.t. <https://jurnaltvonline.com/tanggamus/larangan-bendera-one-piece-di-tanggamus-jadi-olok-olok-publik-ngurusin-kartun-jalan-rusak-dibiarkan/>.

“Arti Mengibarkan Bendera *One piece* yang Ramai di HUT ke-80 RI.” 1 Agustus. <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/08/01/19052571/arti-mengibarkan-bendera-one-piece-yang-ramai-di-hut-ke-80-ri>.

Christiastuti, Novi. “Setelah Indonesia, Bendera *One piece* Muncul di Demo Nepal-Prancis.” *detiknews*. <https://news.detik.com/internasional/d-8108517/setelah-indonesia-bendera-one-piece-muncul-di-demo-nepal-prancis>.

Dika Fitrian. “Viral ! Polemik Bendera *One piece* di Media Sosial Menjelang 17 Agustus.” *Radar tv news online*. Diakses 8 Januari 2026. <https://radartv.disway.id/viral/read/26081/viral-polemik-bendera-one-piece-di-media-sosial-menjelang-17-agustus>.

Dominius Desmantri Barus. “Buruh PT San Xiong Steel Kibarkan Bendera *One piece*, Kecewa Terhadap Pemerintah.” *Tribunlampung.co.id*. <https://lampung.tribunnews.com/2025/08/03/buruh-pt-san-xiong-steel-kibarkan-bendera-one-piece-kecewa-terhadap-pemerintah>.

Gusti.grehenson. “Fenomena Bendera *One piece* Dinilai Sebagai Bentuk Ekspresi Perlawanan Simbolik.” *Universitas Gadjah Mada*, 14 Agustus 2025. <https://ugm.ac.id/id/berita/fenomena-bendera-one-piece-dinilai-sebagai-bentuk-ekspresi-perlawanan-simbolik/>.

Haekal Attar. “Akademisi Pastikan Tidak Ada Unsur Pidana dalam Tindakan Pengibaran Bendera *One piece*.” *NU Online*. Diakses 23 September 2025. <https://www.nu.or.id/nasional/akademisi-pastikan-tidak-ada-unsur-pidana-dalam-tindakan-pengibaran-bendera-one-piece-R41cH>.

Kumparan. “Isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009.” 2024. <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/isi-undang-undang-republik-indonesia-nomor-24-tahun-2009-22EDqr6Ja0S>.

“Lbh: Pengibaran Bendera *One piece* Tak Bisa Dipidana.” *cnn indonesia*, 7 Agustus 2025. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250806172740-12-1259481/lbh-pengibaran-bendera-one-piece-tak-bisa-dipidana>.

RI, DPR. “Fenomena Bendera *One piece* Bagian Dari Ekspresi, Pemerintah Harus Intropeksi.” DPR RI. <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/58271>.

Salma. “Definisi Operasional: Ciri, Contoh, Cara Menyusunnya.” Diakses 24 September 2025. <https://penerbitdeepublish.com/definisi-operasional/>.

Sayuti. “Berdikari - Warga Tanggamus Nilai Larangan Bendera *One piece* Berlebihan: Itu Hanya Kartun.” Berdikari.co. <https://www.berdikari.co/2025/08/15/warga-tanggamus-nilai-larangan-bendera-one-piece-berlebihan-itu-hanya-kartun>.

“Soal Pengibaran Bendera ‘*One piece*’ Jelang 17 Agustus, Anggota DPR: Makar Itu.” 1 Agustus. <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/01/12220571/soal-pengibaran-bendera-one-piece-jelang-17-agustus-anggota-dpr-makar-itu>.

Suyati. “Pemkab Tanggamus Larang Pengibaran Bendera *One piece* di Ruang Publik dan Digital.” Kupastuntas.co. <https://kupastuntas.co/2025/08/15/pemkab-tanggamus-larang-pengibaran-bendera-one-piece-di-ruang-publik-dan-digital>.

Tempo. “Apakah Pengibaran Bendera *One piece* Merendahkan Bendera Merah Putih? | tempo.co.” 9 Agustus 2025. <https://www.tempo.co/politik/apakah-pengibaran-bendera-one-piece-merendahkan-bendera-merah-putih--2056850>.

Tempo. “Larangan Pengibaran Bendera *One piece* di Beberapa Daerah | tempo.co.” 9 Agustus 2025. <https://www.tempo.co/politik/larangan-pengibaran-bendera-one-piece-di-beberapa-daerah-2056737>.

TIMES Indonesia. “Politik Penggunaan Bendera Bajak Laut dalam Perspektif Fikih Siyasah.” 2 Agustus 2025. <https://timesindonesia.co.id/kopi-times-forum-dosen/548831/politik-penggunaan-bendera-bajak-laut-dalam-perspektif-fikih-siyasah>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A